

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga, Jakarta: Binarupa aksara.
- Badan POM, 2006, *Pedoman Cara pembuatan Obat Yang Baik Guidelines On Good Manufacturing Practices*, Jakarta: Badan POM.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chares J.P. Siregar, 2003, *Farmasi Rumah Sakit: Teori dan Penerapan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Direktoral Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- Direktoral Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apoteks*, Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Direktoral Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Endang Wahyati dkk., 2015, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata.
- Freedly Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Bandung: Mandar Maju.

- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jum Aggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Lexy J Moleong, 2017, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Lukman Santoso Az dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum, Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*, Malang: Setara Press.
- Moh Anief, 2000, *Prinsip Umum Dan Dasar Farmakologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- _____, 2014, *Manajemen Farmasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan tata Usaha Negara*, Liberty: Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Robertus Kustoyo, 2000, *Kajian Kritis Atas UU Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di Bidang Farmasi*, Namora: Jakarta.

Rosmawati, 2018, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Depok: Prenadamedia.

Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Siti Soetami, 1993, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Soekidjo Notoatmodjo, 2005, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, Bandung: Mandar Maju.

Sri Siswati, 2017, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan*, Depok: RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

Victor M. Situmorang dan Jusuf juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*.

Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Kosumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Diakses di <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU51997.pdf>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diakses di <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38770>

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Diakses di <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-pemerintah-nomor-72-tahun-1998-tentang-pengamanan-sediaan-farmasi-dan-alat-kesehatan.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4975>

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor. Diakses di <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/PP442010.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5768/pp-no-47-tahun-2016>

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73132/perpres-no-80-tahun-2017>

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Diakses di <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/ln/1989/ips1-1989.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. Diakses di <https://www.persi.or.id/images/regulasi/PMK/pmk11482011.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Diakses di <https://www.persi.or.id/images/regulasi/PMK/pmk722016.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Diakses di <https://www.persi.or.id/images/regulasi/PMK/pmk732016.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Diakses di <https://www.persi.or.id/images/regulasi/PMK/pmk742016.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi. Diakses dilic.binfar.kemkes.go.id/upload/regulation/PMK302017.pdf

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Diakses di <http://ditjenpp.kemkenham.go.id/arsip/bn/2018/bn636-2018.pdf>

Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. Diakses di <http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20180926081742perwal62.pdf>

INTERNET

Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, 2018, *Laporan Tahunan BPOM 2017*, diakses <https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180710/Laporan%20Tahunan%20BPOM%202017.pdf>

Direktorat Bidang Pengamanan Deputi Bidang Penindakan Badan POM RI, 2019, *Laporan Tahun 2018*, diakses https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190708/Direktorat_Pengamanan.pdf

Rahmi Yuningsih, "Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Juni 2017. diakses di <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1252>

Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Universitas Islam Riau, UIR Law Review, Vol 02 No.1, April 2018. Diakses di <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/991>

Taufikkurahman, *Peran BPOM dan BPKN Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran vaksin Palsu*, Jurnal Ekonomi dan

